



# LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

---

SEMESTER I - TAHUN 2021  
NO. 16/LAP/PK/KI/01.05/07/2021

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi  
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Disahkan di Jakarta

Juli 2021

Sekretaris Jenderal  
Komisi Yudisial,

Arie Sudihar

Ketua Tim Penilai Internal,

Jumain

## KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Komisi Yudisial Republik Indonesia mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi korupsi dalam hal kualitas bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam persepsi korupsi di Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang diambil melalui kuesioner.

Berdasarkan hasil survei, masih diperlukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak.

Jakarta, 28 Juli 2021

Tim Penilai Internal

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja .....	2
METODOLOGI.....	4
A. Metode Penelitian .....	4
B. Populasi Dan Sampel .....	4
C. Teknis Analisis Data .....	4
D. Tahapan Pelaksanaan.....	5
INDEKS PERSEPSI KORUPSI .....	7
A. Profil Responden .....	7
1. Tingkat Pendidikan Responden .....	7
2. Jenis Pekerjaan Responden.....	7
3. Kelompok Usia Responden .....	8
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator .....	9
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	9
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	9
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
4. Indikator Transaksi Biaya .....	10
5. Indikator Biaya Tambahan.....	11
6. Indikator Hadiah .....	11
7. Indikator Transparansi Pembayaran .....	12
8. Indikator Percaloan.....	12
9. Indikator Perbuatan Curang .....	13
10. Indikator Transaksi Rahasia .....	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim .....	14
PENUTUP .....	15
A. KESIMPULAN.....	15
B. REKOMENDASI .....	15
LAMPIRAN .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi.....	6
Tabel 2. Nilai Persepsi .....	6
Tabel 3. Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim .....	15

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas.....	5
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden .....	7
Gambar 3. Jenis Pekerjaan Responden .....	8
Gambar 4. Kelompok Usia Responden .....	8
Gambar 5. Indikator Manipulasi Peraturan .....	9
Gambar 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	9
Gambar 7. Indikator Menjual Pengaruh .....	10
Gambar 8. Indikator Transaksi Biaya.....	10
Gambar 9. Indikator Biaya Tambahan .....	11
Gambar 10. Indikator Hadiah .....	11
Gambar 11. Indikator Transparansi Pembayaran.....	12
Gambar 12. Indikator Percaloan .....	12
Gambar 13. Indikator Perbuatan Curang.....	13
Gambar 14. Indikator Transaksi Rahasia .....	13
Gambar 15. Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim .....	14

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi salah satu pencapaian sasaran hasil utama, yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Komisi Yudisial menetapkan Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai *pilot project*. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

### B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### **D. Rencana Kerja**

#### *Persiapan*

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana.  
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan.
  - Kuesioner;
  - Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
  - Kelengkapan peralatan.

- Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
  - Jumlah responden;
  - Lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan Jadwal.  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### *Pelaksanaan Pengumpulan*

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### *Metode Survei*

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 (enam) bulan (dua kali dalam satu tahun).

## METODOLOGI

### A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Teknik sampel menggunakan Teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, tentunya orang tersebut pernah menerima layanan yang diberikan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

### C. Teknis Analisis Data

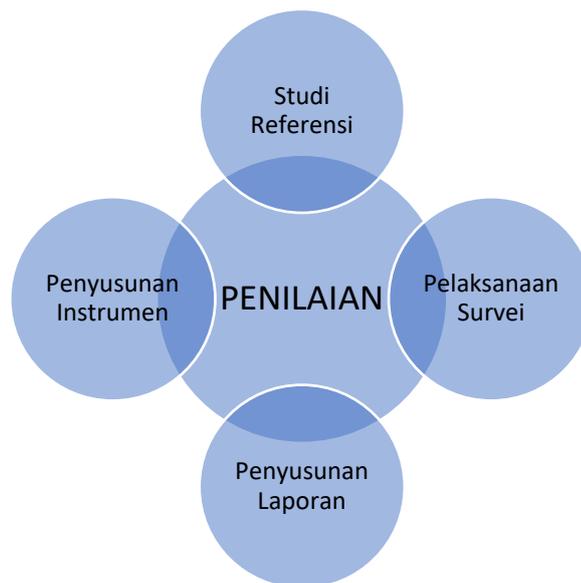
Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap periodenya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama  
Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- Kedua  
Mencari bobot rata-rata setiap indikator.  
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.  
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

#### D. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi

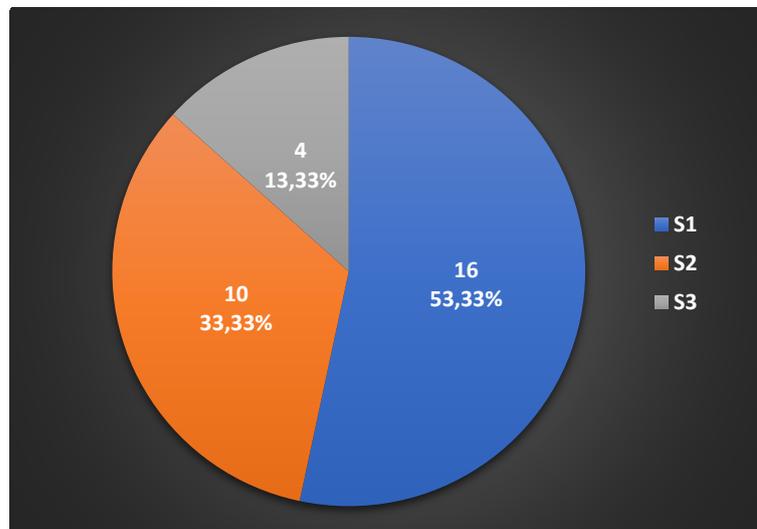
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

## INDEKS PERSEPSI KORUPSI

### A. Profil Responden

#### 1. Tingkat Pendidikan Responden

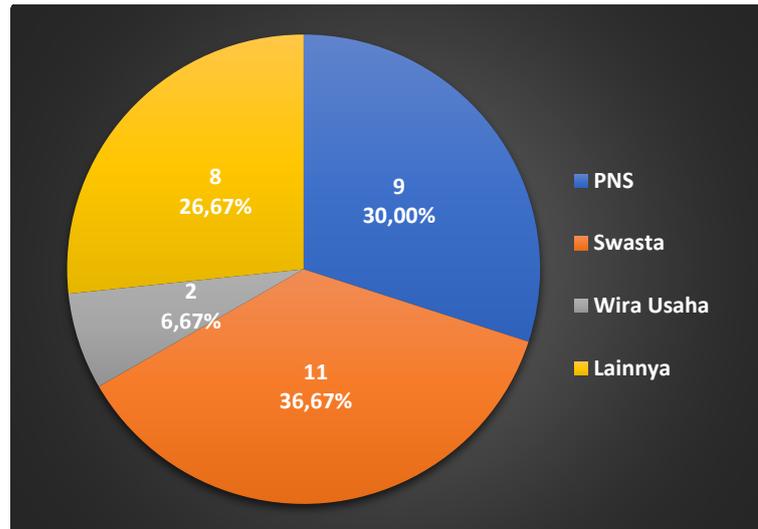
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial mayoritas memiliki latar pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 16 responden (53,33%) dari total 30 responden.



Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden

#### 2. Jenis Pekerjaan Responden

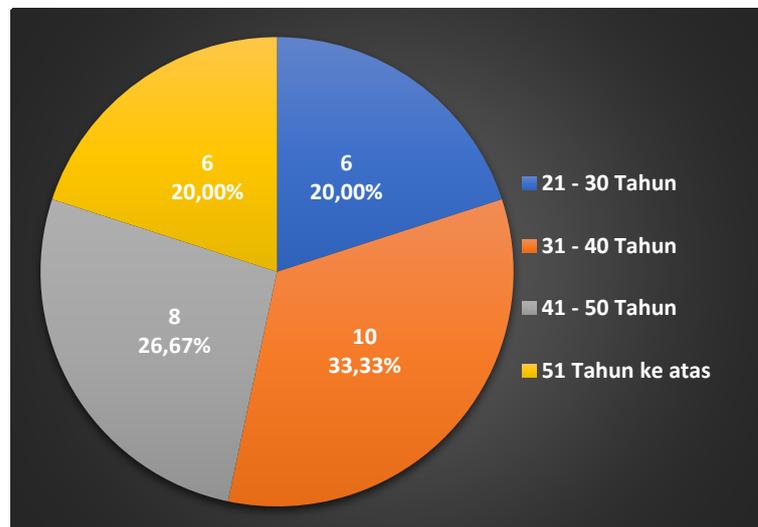
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 36,67% responden pengguna layanan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial memiliki pekerjaan swasta.



Gambar 3. Jenis Pekerjaan Responden

### 3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada kelompok usia 31 – 40 Tahun, yaitu sebesar 33,33%.

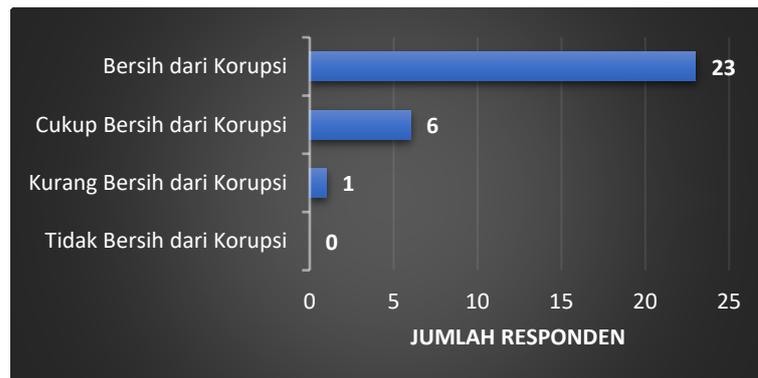


Gambar 4. Kelompok Usia Responden

## B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

### 1. Indikator Manipulasi Peraturan

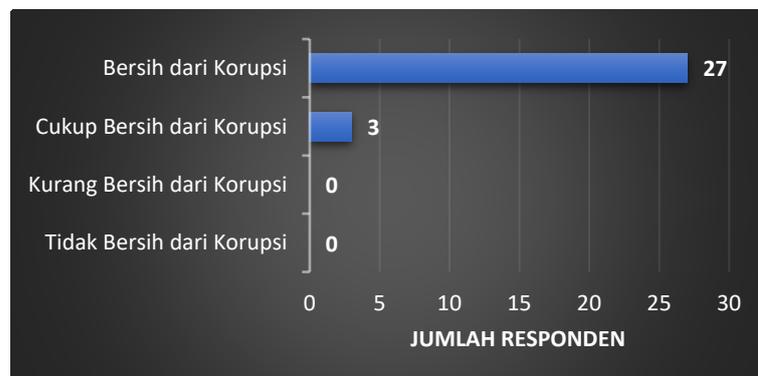
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,73 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 93,33%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Manipulasi Peraturan.



Gambar 5. Indikator Manipulasi Peraturan

### 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

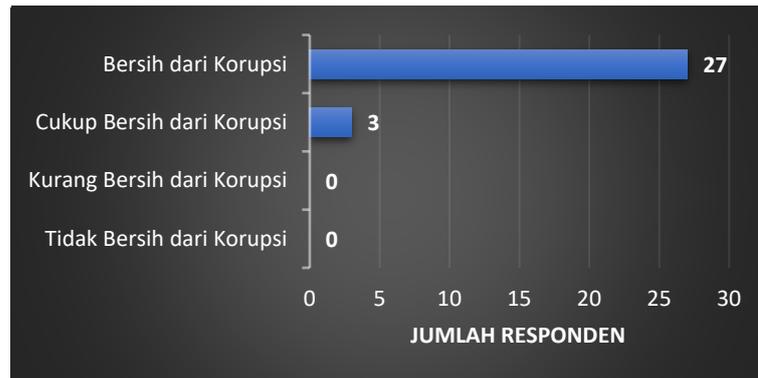
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,90 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 97,50%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Penyalahgunaan Jabatan.



Gambar 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

### 3. Indikator Menjual Pengaruh

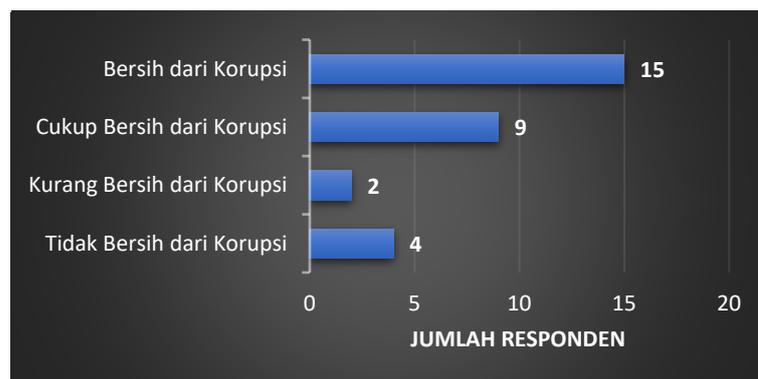
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,90 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 97,50%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Menjual Pengaruh.



Gambar 7. Indikator Menjual Pengaruh

### 4. Indikator Transaksi Biaya

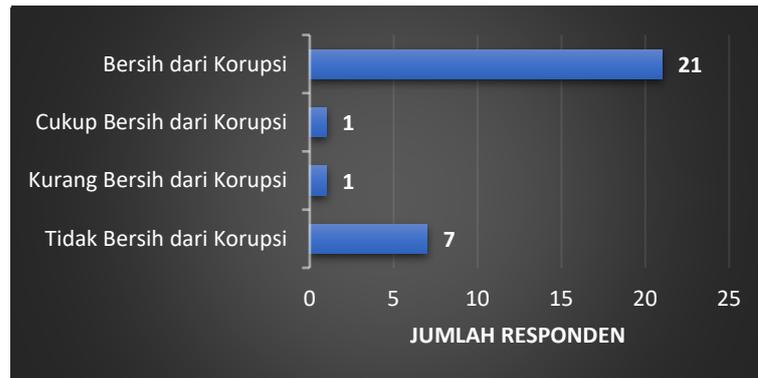
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,17 berada pada nilai interval 2,51 s/d 3,25 atau nilai konversi 79,17%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Cukup Bersih dari Korupsi atas Transaksi Biaya.



Gambar 8. Indikator Transaksi Biaya

### 5. Indikator Biaya Tambahan

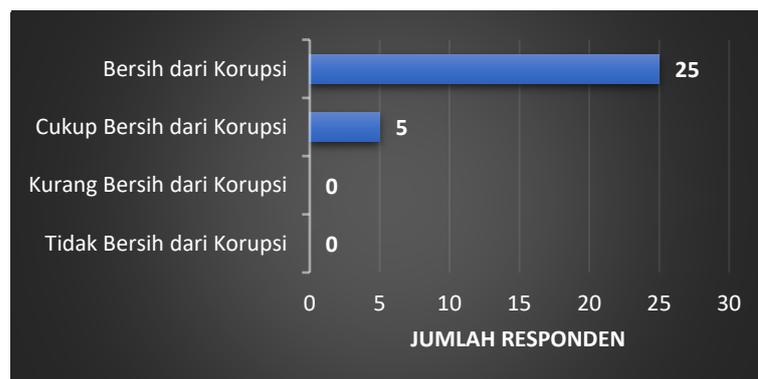
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,20 berada pada nilai interval 2,51 s/d 3,25 atau nilai konversi 80,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Cukup Bersih dari Korupsi atas Biaya Tambahan.



Gambar 9. Indikator Biaya Tambahan

### 6. Indikator Hadiah

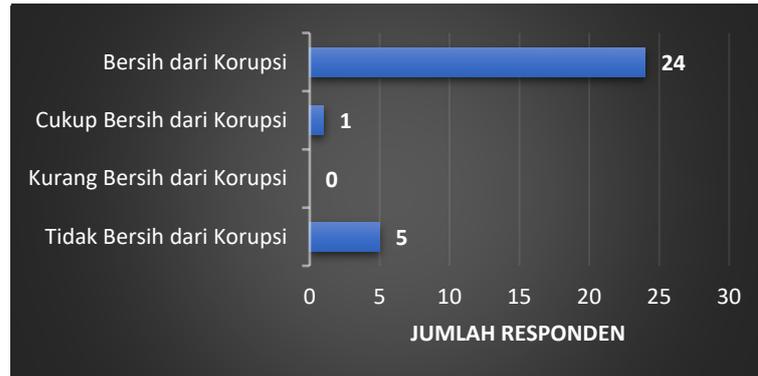
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,83 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 95,83%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Hadiah.



Gambar 10. Indikator Hadiah

### 7. Indikator Transparansi Pembayaran

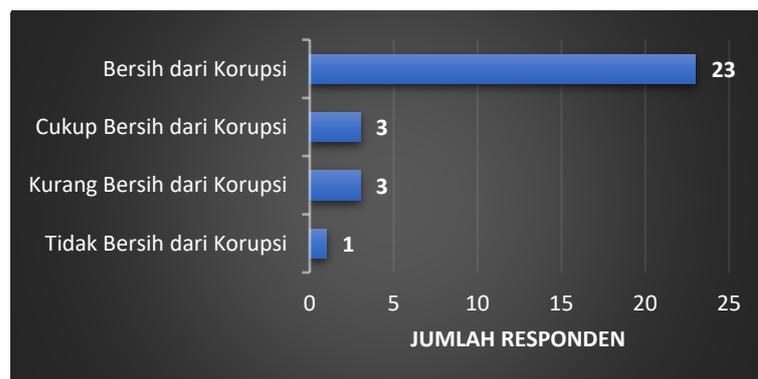
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,47 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 86,67%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Transparansi Pembayaran.



Gambar 11. Indikator Transparansi Pembayaran

### 8. Indikator Percaloan

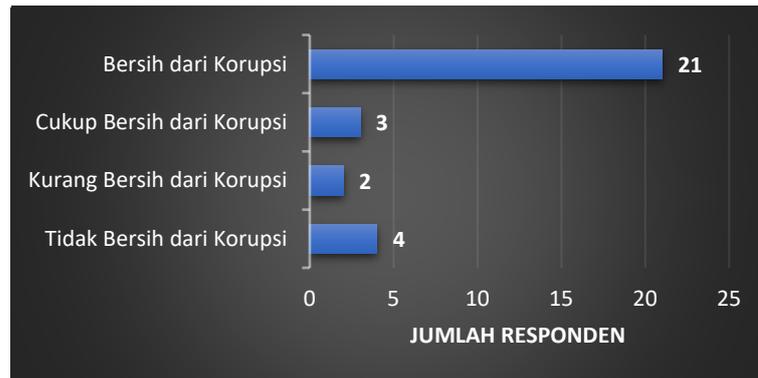
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,60 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 90,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Percaloan.



Gambar 12. Indikator Percaloan

### 9. Indikator Perbuatan Curang

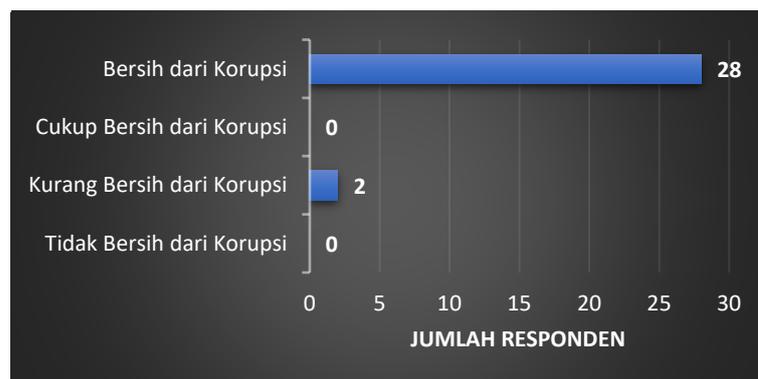
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,37 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 84,17%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Perbuatan Curang.



Gambar 13. Indikator Perbuatan Curang

### 10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,87 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 96,67%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Transaksi Rahasia.



Gambar 14. Indikator Transaksi Rahasia

### C. Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial sebesar 3,60 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 90,08%.



Gambar 15. Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,60 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks berikut:

Tabel 3. Indeks Persepsi Korupsi Biro Pengawasan Perilaku Hakim

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI INDEKS	KATEGORI	RANK
1	Manipulasi Peraturan	3,73	Bersih dari Korupsi	5
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,90	Bersih dari Korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	3,90	Bersih dari Korupsi	2
4	Transaksi Biaya	3,17	Cukup Bersih dari Korupsi	10
5	Biaya Tambahan	3,20	Cukup Bersih dari Korupsi	9
6	Hadiah	3,83	Bersih dari Korupsi	4
7	Transparansi Pembayaran	3,47	Bersih dari Korupsi	7
8	Percaloan	3,60	Bersih dari Korupsi	6
9	Perbuatan Curang	3,37	Bersih dari Korupsi	8
10	Transaksi Rahasia	3,87	Bersih dari Korupsi	3

### B. REKOMENDASI

Merujuk pada hasil indeks persepsi korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Semester 1 Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata indikator memiliki indeks 3,60 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator transaksi biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanan dalam hal tersebut.

## LAMPIRAN

**Kuesioner  
Survei Indeks Persepsi Korupsi  
dan Kepuasan Layanan  
Komisi Yudisial RI**



## Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Kepuasan Layanan

Unit Layanan Biro Pengawasan Hakim  
**\* Required**

Profil Responden

Jenis Kelamin \*

Laki-laki  
 Perempuan

Usia \*

20 Tahun ke bawah  
 21 - 30 Tahun  
 31 - 40 Tahun  
 41 - 50 Tahun  
 51 Tahun ke atas

Pendidikan \*

SD  
 SMP  
 SMA  
 S1  
 S2  
 S3

Pekerjaan \*

PNS  
 TNI  
 POLRI  
 Swasta  
 Wira Usaha  
 Other: \_\_\_\_\_

**Next**

Never submit passwords through Google Forms.  
This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

**Kuesioner  
Survei Indeks Persepsi Korupsi  
dan Kepuasan Layanan**

**Komisi Yudisial RI**



## Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Kepuasan Layanan

\* Required

**Pendapat Responden Tentang Persepsi Korupsi**

Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? \*

	1	2	3	4	
Tidak Pernah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Selalu

Apakah dalam memperoleh layanan, petugas meminta imbalan tertentu? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (petugas/karyawan) yang akan membantu dengan meminta imbalan? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Apakah anda selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? \*

	1	2	3	4	
Tidak Pernah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Selalu

Apakah anda tidak pernah dipungut biaya (gratis)? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Apakah anda tidak pernah dipungut biaya (gratis)? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Apakah saudara mengetahui/dijelaskan oleh petugas bahwa dalam pengurusan layanan tidak dipungut biaya? \*

	1	2	3	4	
Tidak Mengetahui	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mengatahui

Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Apakah pernah melakukan pertemuan dengan petugas di luar kantor komisi yudisial, untuk membahas layanan yg sedang dtangani? \*

	1	2	3	4	
Selalu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tidak Pernah

Selanjutnya, Saudara dapat memberikan saran - saran perbaikan agar Komisi Yudisial bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

Your answer

[Back](#)

[Next](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

NILAI PERUNSUR RESPONDEN											
NO	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	TOTAL
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3,20
5	3	4	4	4	1	4	4	2	4	4	3,40
6	3	4	4	1	1	4	1	4	3	4	2,90
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3,60
9	4	4	4	4	1	4	4	1	1	4	3,10
10	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	3,70
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
12	3	4	4	1	1	4	4	4	1	4	3,00
13	3	4	4	1	1	4	1	2	1	4	2,50
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
17	4	4	4	2	4	3	1	4	4	4	3,40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,90
20	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,90
21	3	3	3	3	1	4	1	4	4	4	3,00
22	2	3	3	3	2	3	1	4	2	4	2,70
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
24	4	4	4	2	4	4	4	2	2	4	3,40
25	4	4	4	4	1	4	4	4	4	2	3,50
26	4	4	4	3	4	3	3	3	1	2	3,10
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,90
29	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,90
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
JUMLAH	112	117	117	95	96	115	104	108	101	116	
N RATA-RATA	3,73	3,90	3,90	3,17	3,20	3,83	3,47	3,60	3,37	3,87	
NRR TERTIMBANG	<b>0,37</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>	<b>0,34</b>	<b>0,39</b>	<b>3,60</b>

Keterangan:	
Q1 – Q10	: Unsur-unsur Pertanyaan
NRR	: Nilai Rata-rata
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
<b>IPK : 3,60</b>	

No	Unsur Pertanyaan	Nilai
Q1	Manipulasi Peraturan	3,73
Q2	Penyalahgunaan Jabatan	3,90
Q3	Menjual Pengaruh	3,90
Q4	Transaksi Biaya	3,17
Q5	Biaya Tambahan	3,20
Q6	Hadiah	3,83
Q7	Transparansi Pembayaran	3,47
Q8	Percaloan	3,60
Q9	Perbuatan Curang	3,37
Q10	Transaksi Rahasia	3,87
<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>3,60</b>

